

Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Silvia Hardianti^{1*}, Ratna Sari Dewi², Indra Fauzi³, Henny Andiyani Wirananda⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah, Indonesia

*Email: silviahardiantimanik@gmail.com

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20147

*Penulis Korespondensi

Abstract. *The advancement of information technology has significantly impacted public financial management in Indonesia. To strengthen good governance, which encompasses transparency, accountability, efficiency, and effectiveness, the government introduced the Local Government Information System (SIPD). The implementation of this system is regulated under Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019 and further reinforced by Circular Letter No. 500.5.4/48/SJ of 2023, which mandates all local governments to adopt SIPD starting in the 2024 fiscal year. SIPD replaces the Regional Management Information System (SIMDA), which was considered to have limitations in integration, slow processes, and inconsistencies in financial reporting. This study aims to analyze the implementation of SIPD and its impact on the quality of financial reporting at the Human Resources and Development Agency (BKPSDM) of Subulussalam City. The research employs a qualitative descriptive method with a case study design, collecting data through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The research informants are employees directly involved in SIPD operations and financial report preparation. The findings indicate that SIPD enhances the quality of financial reporting in four aspects of the Government Accounting Standards (SAP). Relevance improves as reports are more timely and useful for decision-making; reliability increases through automated validation, though network disruptions and system errors remain obstacles; comparability is achieved because SIPD produces standardized national reports; and consistency is strengthened through uniform reporting procedures, thereby improving the credibility of financial information. However, the study also identifies challenges, including limited technical competence among employees, insufficient training, and inadequate infrastructure. These findings suggest that the success of SIPD largely depends on human resource readiness and technological support.*

Keywords: *Financial Quality; Government Accounting; Public Financial Management; SIPD; Technology Infrastructure.*

Abstrak. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, pemerintah memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penerapan sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 serta diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 500.5.4/48/SJ Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakannya mulai tahun anggaran 2024. SIPD menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dinilai memiliki keterbatasan integrasi, lambatnya proses, serta ketidakseragaman laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SIPD serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam operasional SIPD dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai empat aspek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aspek relevansi meningkat karena laporan lebih tepat waktu dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Aspek keandalan bertambah melalui validasi otomatis meskipun masih terdapat kendala jaringan dan kesalahan sistem. Aspek keterbandingan tercapai karena laporan distandarisasi secara nasional, sedangkan aspek konsistensi terjaga melalui penerapan prosedur pelaporan yang seragam sehingga meningkatkan kredibilitas informasi keuangan. Penelitian juga menemukan kendala berupa keterbatasan kompetensi teknis pegawai, minimnya pelatihan, dan infrastruktur yang belum memadai. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan SIPD bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknologi.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan; Infrastruktur Teknologi; Kualitas Laporan; Pengelolaan Keuangan; SIPD.

1. LATAR BELAKANG

Percepatan teknologi informasi di era globalisasi berdampak besar pada banyak bidang, terutama dalam pengelolaan pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan daerah merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik (Kardina et al., 2024). Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara efektif dengan dukungan sistem informasi yang memadai (Bastian, 2019). Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi diyakini dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam penyajian informasi keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat terjaga (Mahmudi, 2021).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik telah diwujudkan melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah secara nasional (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Dengan diberlakukannya Surat Edaran No. 500.5.4/48/SJ Tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa mulai tahun anggaran 2024, seluruh pemerintah daerah diwajibkan menggunakan SIPD sebagai aplikasi resmi dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan konsisten sesuai prinsip good governance (Mardiasmo, 2018).

Sebelum adanya SIPD, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Subulussalam, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk memfasilitasi proses pengelolaan keuangan di daerah mulai dari proses penganggaran, akuntansi, hingga pelaporan. Namun, SIMDA dinilai memiliki berbagai keterbatasan, antara lain belum terintegrasi secara nasional, masih bergantung pada jaringan lokal, serta tidak sepenuhnya mampu mendukung proses pengelolaan data secara real time. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan potensi terjadinya perbedaan data antarperangkat daerah (Kuncoro, 2018).

Penerapan SIPD diharapkan mampu memperbaiki kelemahan tersebut dengan menyediakan platform yang lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya SIPD, proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, SIPD juga mendukung pemerintah daerah dalam

memenuhi prinsip akuntabilitas publik karena laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun auditor eksternal (Mahmudi, 2021).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal penting karena laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan yang baik harus memenuhi empat karakteristik kualitatif utama menurut SAP, yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Relevansi mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mardiasmo, 2018). Reliabilitas berarti informasi keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material, dapat diverifikasi, dan menggambarkan kondisi sebenarnya (Mahmudi, 2021). Komparabilitas menekankan bahwa laporan keuangan harus dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas, sehingga mendukung transparansi evaluasi kinerja (Bastian, 2019). Sementara itu, konsistensi menuntut penerapan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu, agar informasi keuangan mudah dipahami dan digunakan (PP No. 71 Tahun 2010).

Dalam praktiknya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil pemeriksaan BPK sering kali menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada opini audit laporan keuangan daerah. Hal tersebut menegaskan bahwa penerapan SIPD tidak dapat sepenuhnya menjamin kualitas laporan keuangan tanpa adanya penguatan kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai (Sugiyono, 2019).

Kota Subulussalam, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh, juga menghadapi dinamika serupa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam sebelumnya masih mengandalkan SIMDA untuk menyusun laporan keuangan. Namun, sejak adanya kebijakan nasional, BKPSDM dituntut beralih menggunakan SIPD. Peralihan sistem ini tidak hanya membutuhkan adaptasi teknis, tetapi juga kesiapan pegawai dalam memahami fitur-fitur SIPD. Hambatan yang sering muncul antara lain keterbatasan pemahaman teknis pengguna, keterbatasan jaringan internet di daerah, serta kurangnya pelatihan intensif yang berkesinambungan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama penerapan SIPD, yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan di lingkup pemerintah daerah (Permendagri, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan. Namun, sebagian besar penelitian dilakukan di kota besar dengan dukungan infrastruktur yang relatif memadai. Hasil

penelitian Anjani dan Framesthi (2021) mengungkapkan bahwa penerapan SIPD memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di salah satu kecamatan di Jawa Barat, sedangkan Fitriasari (2020) menekankan bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD. Penelitian serupa di Kota Medan oleh Nasution (2021) mengungkapkan bahwa meskipun SIPD sudah diterapkan, masih terdapat kendala teknis yang menghambat pencapaian kualitas laporan keuangan.

Namun, kajian terkait implementasi SIPD di daerah kecil dengan keterbatasan sumber daya seperti Kota Subulussalam masih terbatas. Padahal, perbedaan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, serta dukungan infrastruktur dapat memengaruhi efektivitas penerapan SIPD. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana penerapan SIPD dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada BKPSDM Kota Subulussalam.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan SIPD dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan di BKPSDM Kota Subulussalam. Fokus analisis diarahkan pada empat karakteristik utama laporan keuangan menurut SAP, yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan SIPD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola data keuangan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Menurut Pratiwi (2024), keberadaan SIPD tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga berperan sebagai sarana pengendalian internal agar setiap proses penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sejalan dengan pendapat Nasrun (2012) yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi akan meningkatkan ketepatan dan keandalan data sehingga kualitas laporan keuangan semakin baik.

Kualitas laporan keuangan sendiri ditentukan oleh sejauh mana laporan tersebut memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Halim, 2019). Dengan penerapan SIPD, pemerintah daerah memiliki akses terhadap basis data yang real-time dan terpusat sehingga mampu meminimalkan kesalahan pencatatan maupun

keterlambatan pelaporan. Penelitian Abdallah dan Suwanda (2025) menunjukkan bahwa implementasi SIPD yang belum optimal dapat menimbulkan kendala teknis seperti keterbatasan akses sistem, kesalahan input data, dan kurangnya pelatihan pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa dengan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan prosedur, SIPD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi sektor publik.

Di Kota Subulussalam, penerapan SIPD diharapkan mampu mendukung proses penyusunan laporan keuangan secara lebih efisien dan akurat. Hasil analisis Yulianda dkk. (2022) menunjukkan bahwa meskipun implementasi SIPD di beberapa daerah menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, keberadaan sistem ini tetap memberikan dampak positif terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan SIPD di Kota Subulussalam menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat memperkuat kualitas laporan keuangan dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada BKPSDM Kota Subulussalam, terutama terkait aspek relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi.

Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena instansi tersebut merupakan salah satu perangkat daerah yang telah menerapkan SIPD sebagai pengganti SIMDA, sehingga menjadi objek yang relevan untuk dianalisis. Subjek penelitian meliputi pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan berbasis SIPD. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih responden berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Kuncoro, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari pegawai mengenai pengalaman, kendala, dan manfaat penerapan SIPD. Observasi dilakukan untuk mengamati

langsung proses penggunaan aplikasi SIPD, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti dokumen laporan keuangan, pedoman, dan arsip internal BKPSDM (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan yang menggambarkan hubungan antara penerapan SIPD dan kualitas laporan keuangan (Miles et al., 2014).

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan SIPD di BKPSDM Kota Subulussalam. serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peningkatan kualitas laporan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam, diperoleh informasi bahwa instansi ini mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada awal tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Sebelum itu, pengelolaan keuangan masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Peralihan ke SIPD di BKPSDM berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, dilakukan proses sosialisasi dan pelatihan dasar kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan. Namun, wawancara dengan informan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai terhadap sistem masih terbatas. Beberapa pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu, terutama yang berkaitan dengan input data transaksi keuangan.

Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa SIPD telah membantu mempercepat proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan konsolidasi data antar bidang menjadi lebih singkat dibandingkan ketika menggunakan SIMDA. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet yang menghambat kelancaran akses sistem. Kondisi ini sering menyebabkan keterlambatan dalam proses input data.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan BKPSDM. Secara umum, laporan yang dihasilkan menjadi

lebih relevan karena data dapat diakses secara cepat dan sesuai kebutuhan pengguna. Dari sisi reliabilitas, laporan menjadi lebih akurat karena SIPD secara otomatis melakukan validasi terhadap data yang diinput. Namun, reliabilitas ini masih terganggu ketika terjadi error sistem atau keterlambatan jaringan.

Aspek komparabilitas juga mengalami peningkatan karena laporan yang dihasilkan melalui SIPD menggunakan format baku nasional, sehingga dapat dibandingkan antarperiode maupun antardaerah. Hal ini berbeda dengan SIMDA yang lebih fleksibel tetapi kurang seragam. Sedangkan untuk aspek konsistensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD mendorong pegawai untuk menggunakan prosedur yang sama dari tahun ke tahun, meskipun masih memerlukan adaptasi di tahap awal implementasi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan SIPD di BKPSDM Kota Subulussalam memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi sektor publik dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi laporan keuangan.

Peningkatan relevansi laporan keuangan melalui SIPD mendukung pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa informasi yang relevan adalah informasi yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya SIPD, pengguna laporan di BKPSDM dapat memperoleh data yang lebih tepat waktu, sehingga mendukung efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dari sisi reliabilitas, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Bastian (2019) bahwa laporan keuangan yang disusun dengan dukungan sistem informasi memiliki tingkat keandalan lebih tinggi karena minim campur tangan manual. Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa reliabilitas masih dapat terganggu akibat kendala teknis seperti error sistem. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknologi dan infrastruktur masih menjadi faktor penting dalam mendukung reliabilitas laporan.

Aspek komparabilitas yang meningkat sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menghendaki agar laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode. Dengan SIPD, format laporan keuangan lebih seragam sehingga memudahkan analisis lintas periode maupun lintas daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Nasution (2021) yang menemukan bahwa SIPD meningkatkan konsistensi dan keseragaman laporan di Kota Medan.

Sedangkan aspek konsistensi memperlihatkan adanya perbaikan prosedur penyusunan laporan keuangan. Dengan sistem yang sama, pegawai terdorong untuk mengikuti alur proses yang seragam. Hal ini mendukung pendapat Mahmudi (2021) bahwa konsistensi dalam laporan keuangan penting agar informasi yang disajikan tetap dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai pihak.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menyoroti adanya hambatan serius dalam implementasi SIPD. Hambatan utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis pegawai, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan gangguan jaringan internet. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriasari (2020) yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan. Tanpa peningkatan kompetensi SDM, manfaat SIPD tidak akan optimal.

Kendala teknis seperti gangguan server juga menjadi perhatian penting yang dikemukakan oleh Fitriani dan Solikhin (2023) bahwa dalam penelitiannya menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur. Perbaikan jaringan dan sistem pendukung merupakan prasyarat agar SIPD benar-benar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada BKPSDM Kota Subulussalam sudah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, namun belum sepenuhnya optimal. Perlu adanya strategi pendukung seperti peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan pendampingan berkelanjutan agar tujuan utama dari penerapan SIPD tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada BKPSDM Kota Subulussalam, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini tercermin pada terpenuhinya empat karakteristik utama laporan keuangan sesuai SAP (PP No. 71 Tahun 2010), yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. SIPD terbukti mempercepat penyajian laporan, meminimalisasi kesalahan pencatatan, menyediakan format baku nasional, dan mendorong penggunaan prosedur yang seragam dari tahun ke tahun. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi pegawai, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta gangguan jaringan yang dapat mempengaruhi reliabilitas data (Mahmudi, 2021; Mardiasmo, 2018).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia,

infrastruktur teknologi, serta komitmen manajerial dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance. Temuan ini menguatkan pandangan Bastian (2019) dan Fitriasari (2020) bahwa sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi harus didukung oleh kapasitas pengguna yang memadai agar mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdallah, A., & Suwanda, D. (2025). *Optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Anjani, D., & Framesthi, R. (2021). Pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 115–124.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriani, D., & Solikhin, A. (2023). Kesiapan infrastruktur dalam penerapan SIPD di pemerintah daerah. *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, 5(1), 33–41.
- Fitriasari, L. (2020). Kompetensi SDM dan pengaruhnya terhadap implementasi SIPD. *Jurnal Kemendagri Akuntansi Pemerintahan Daerah*, 6(3), 221–230.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Penilaian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 615–620.
- Kemendagri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kemendagri. (2023). *Surat Edaran No. 500.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode riset untuk bisnis & ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nasrun, A., Hendrawan, R. A., & Priandi, M. (2012). Urgensi integrasi sistem informasi akuntansi instansi pemerintah. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), A589–A591.
- Nasution, I. (2021). Implementasi SIPD dan dampaknya terhadap laporan keuangan di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 4(2), 87–96.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12.
- Pratiwi, D. (2024). Strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif melalui sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. *Jurnal Ilmu Data*, 4(3).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). Pengaruh kompetensi pengguna, teknologi informasi dan implementasi SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 794–804.